

PENGARUH *POLITICAL EFFICACY* DAN *SOCIAL IDENTITY* TERHADAP *CIVIC DUTY TO VOTE*

Firman Firdaus
Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana
firmanbsd@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *political efficacy* dan *social identity* terhadap *civic duty to vote*. Sampel penelitian ini berjumlah 360 partisipan. Instrumen yang digunakan untuk pengukuran *Civic Duty to Vote* pada penelitian ini didasarkan oleh pengukuran dikembangkan oleh Blais dan Galais (2016). Sedangkan untuk pengukuran *Political Efficacy* berdasarkan dari Craig, Niemi, & Silver (1990) melalui dua dimensi yaitu dimensi internal dan eksternal. Terakhir, untuk pengukuran *social identity* menggunakan pengukuran Cameron (2004) dengan nama *Three Dimensional Strength of Group Identification Scale*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis regresi berganda menggunakan software SPSS 20.00. Kesimpulan penelitian ini bahwa ada pengaruh yang signifikan *political efficacy* dan *social identity* terhadap *Civic Duty to Vote*.

Kata kunci: *Civic Duty to Vote, Political Efficacy dan Social Identity*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum selalu menarik perhatian di Negara demokrasi. Para peneliti khawatir tentang menurunnya jumlah pemilih dalam setiap pemilihan, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Daerah. Menurut Carlsson dan Johansson-

Stenman (2009) hasil pemungutan suara sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Sehingga kesadaran masyarakat dalam pemilihan menjadi perhatian utama.

Menurut Chapman (2015) hasil pemilihan harus menjadi fokus perhatian moral dalam pemilihan. Sedangkan hal ini bertentangan dengan pandangan pilihan rasional

klasik yang menyatakan bahwa pemilih hanya harus peduli dalam menentukan hasil pemilihan, upaya-upaya ini merupakan hal yang paling umum untuk menjelaskan *civic duty to vote*. Goldman (1999) dan Beerbohm (2012) berpendapat bahwa seseorang harus peduli tentang hasil pemilihan dan tentang hubungannya dengan hasil tersebut. Blais (2000) mengemukakan bahwa Seseorang yang memiliki rasa *civic duty to vote* maka akan selalu aktif dalam memberikan suara di setiap pemilihan.

CIVIC DUTY TO VOTE

Menurut Goldman (1999) *civic duty to vote* hanya sebagai salah satu tugas umum untuk berkontribusi pada hasil pemilihan yang bernilai secara moral dalam dunia demokrasi. Sedangkan Beerbohm (2012) berpendapat *civic duty to vote* hanya berorientasi pada hasil pemilihan, tetapi pemilihan yang didasarkan pada moral pada dari sistem perwakilan yang jujur dan adil. Menurut Goldman (1999) dan Beerbohm (2012)

menegaskan bahwa seseorang harus peduli tentang hubungannya dengan hasil pemilihan. Pemungutan suara sebagai hal yang sangat penting karena fakta kewarganegaraan yang demokratis telah membangun hubungan antara masyarakat dan tindakan pemerintah. Karena demokrasi menegaskan dan memungkinkan warga negara bertanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Menurut Blais dan Galais (2016) jika seseorang memiliki *civic duty to vote* dalam setiap pemilihan, menurut definisi orang tersebut merasakan kewajiban moral. Terkadang, kewajiban itu menyenangkan, tetapi seringkali tidak. Orang yang diwajibkan berpartisipasi dalam pemilihan menjadikan itu sebagai kesenangan pribadi. Beberapa warga negara mungkin memiliki perasaan *civic duty to vote*. Orang lain mungkin memiliki perasaan *civic duty to vote* dengan cara memilih sesuai aturan tetapi sebagian tidak merasa berkewajiban untuk melakukan

pemilihan sesuai aturan. *Civic duty to vote* memerlukan perasaan kewajiban bagi setiap warga negara (Chapman, 2015).

Demikian juga, warga negara yang memiliki *civic duty to vote* akan mendukung demokrasi suatu, karena warga meyakini bahwa demokrasi yang hidup membutuhkan partisipasi tinggi warga negara. Semua warga negara yang percaya bahwa demokrasi adalah hal yang baik harus bersedia memilih dalam setiap pemilihan pemilihan (Fowler & Kam, 2007). Warga negara yang memiliki rasa *civic duty to vote* kemungkinan akan lebih besar untuk memilih (Campbell, Gurin & Miller, 1954). Bahkan, *civic duty to vote* ini menyebabkan seseorang berpikir secara berbeda tentang tindakan memilih dalam suatu pemilihan (Blais & Achen, 2010).

POLITICAL EFFICACY

Definisi klasik *political efficacy* menurut Campbell, Gurin, dan Miller (1954) digambarkan sebagai perasaan bahwa individu memiliki tindakan

politik, hal ini merupakan dampak pada proses politik. Individu dapat melakukan tugas kemasyarakatan dalam mewujudkan perubahan-perubahan. *Political efficacy* adalah perasaan bahwa perubahan politik dan sosial dapat terjadi serta masyarakat dapat berperan dalam membawa perubahan tersebut.

Political efficacy mempengaruhi prospek keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sipil dan politik (Kahne & Westheimer, 2006). Oleh karena itu, Beaumont (2010) mendefinisikan *political efficacy* sebagai keyakinan individu dalam variasi politik yang mungkin memiliki kapasitas membawa perubahan yang berarti dalam masyarakat melalui keputusan memilih dalam pemilihan. Hylmö dan Wennerhag (2012) menjelaskan perilaku pemilih berkaitan dengan keyakinan politik individu, ketidakberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan masalah krisis ekonomi tidak hanya akan menciptakan ketidakpercayaan publik tetapi juga turut melemahkan keterlibatan publik

dalam pemilu yang diselenggarakan Negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi.

Sementara Ognyanova & Ball-Rokeach (2015) menginvestigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa *political efficacy* terdiri dari dua komponen hal yang saling terkait. Efikasi internal menggambarkan keyakinan bahwa individu dapat memahami kehidupan politik dan berpartisipasi secara efektif di dalamnya, sementara efikasi eksternal mengacu pada persepsi bahwa para aktor politik dan lembaga yang cenderung responsif terhadap tuntutan masyarakat (Niemi, Craig, & Mattei, 1991).

SOCIAL IDENTITY

Social identity telah didefinisikan dalam psikologi sosial sebagai bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaannya dalam kelompok sosial (Tajfel, 1978). Teori *social identity* menunjukkan bahwa diri seseorang ditentukan oleh keanggotaan dalam kategori atau kelompok sosial, termasuk kebangsaan, kelompok

politik, atau afiliasi agama (Tajfel, Turner, Austin, & Worchel, 1979). Sedangkan menurut Turner dan Oakes (1986) *social identity* adalah bahwa seseorang termotivasi untuk mencari identitas sosial yang positif dengan membandingkan antara kelompok yang disukai di luar kelompoknya. Seseorang memperoleh nilai dan signifikansi emosional dari identifikasi anggota dengan merasakan rasa kesatuan dengan anggota lain dalam kelompok tersebut (Dutton, Dukerich, & Harquail, 1994).

Identifikasi kelompok dapat digambarkan sebagai hubungan timbal balik sehingga individu memperoleh makna, memiliki, dan kekhasan positif yang mendefinisikan dan meningkatkan konsep diri individu (Whetten & Mackey, 2002), sementara keanggotaan individu mendukung dan memperkuat kelompok (Ashforth & Mael, 1989). Orang dengan identitas sosial yang kuat berupaya memaksimalkan perbedaan antara didalam kelompok dan diluar kelompok (Greene, 2002). Pada intinya,

teori identitas sosial adalah cerita tentang perilaku antarkelompok. Termotivasi oleh kebutuhan akan identitas sosial yang positif ini, orang akan menyukai orang lain yang mereka anggap berada dalam kelompok sosial yang sama.

POLITICAL EFFICACY TERHADAP CIVIC DUTY TO VOTE

Para peneliti telah mencatat bahwa *political efficacy* adalah penentu penting dari partisipasi pemilih (Aldrich, 1993) serta partisipasi politik secara lebih luas (Verba et al., 1995). Menurut Ahmadu, Don & Hamzat (2016), seseorang menganggap potensi dirinya sebagai sesuatu yang sangat mendasar untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Seseorang yang merasa mempunyai *political efficacy* dalam siklus Pemilihan Umum sebelumnya lebih cenderung aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara (Valentino, Gregorowicz, & Groenendyk, 2009; Manganelli, Lucidi, & Alivernini, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmadu, Don & Hamzat (2016) berjudul *The Influence of*

Citizenship Norms, Efficacy Belief, and Parents' Participation on Students' Civic Engagement in Nigerian Universities: Data Screening and Preliminary Analysis bertujuan untuk membuat konsep dan memvalidasi model menggunakan PLS dalam konteks penelitian keterlibatan sipil. Studi ini menyajikan hasil penelitian keterlibatan sipil yang memanfaatkan PLS-SEM untuk menganalisis bagaimana *political efficacy* dan norma kewarganegaraan mempengaruhi keterlibatan siswa. *Political efficacy* mempunyai peranan kunci untuk menambah rasa kewarganegaraan pada setiap warga negara.

SOCIAL IDENTITY TERHADAP CIVIC DUTY TO VOTE

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *civic duty to vote* berasal dari kelompok (Graham et al. 2011). Bahkan jika seseorang sudah tahu bahwa sumbangan suara tidak akan mengubah hasil pemilihan, masyarakat termotivasi secara moral untuk menjadi bagian dari kelompok yang memberikan kontribusi dalam

menghasilkan hasil pemilihan yang baik (Goldman, 1999; Tuck, 2008). Menurut Foster (2018) bahwa *civic duty to vote* ini berasal dari pengaruh identitas kelompok, dan tekanan sosial yang dihasilkan oleh identitas tersebut. *Civic duty to vote* adalah cerminan dari tekanan sosial yang dihasilkan dari pengidentifikasian dengan suatu kelompok, dan tekanan ini bermanifestasi sebagai kewajiban untuk memilih. Melalui tugas kewarganegaraan, identitas memberikan efek sosial independen pada perilaku partisipasi masyarakat.

Knack (1992) mengidentifikasi bagaimana tekanan sosial dapat memanifestasikan dirinya sebagai rasa kewajiban yang dihasilkan melalui loyalitas kelompok. Oleh karena itu, perasaan bahwa seseorang memiliki kewajiban moral untuk memilih dapat berasal dari keterikatan pada komunitas atau penghormatan terhadap pihak berwenang. Green dan Gerber (2015) menggunakan *civic duty to vote* sebagai efek dari tekanan sosial dan menemukan bahwa untuk tugas

memilih secara langsung mempengaruhi kemungkinan pemungutan suara. Penerimaan yang meluas dari *civic duty to vote* bahkan dapat memotivasi warga yang belum menginternalisasi rasa tugas karena norma dapat ditegakkan melalui tekanan sosial eksternal dan ancaman sanksi sosial (Gerber, Green, dan Larimer 2008).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Foster (2018) berjudul *Identity, Civic Duty and Electoral Participation: Causes of Variation in Electoral Participation* bertujuan untuk *Civic Duty* dapat menangkap variasi yang tidak dapat diprediksi oleh para pemilih biasa. *Civic Duty* dapat menjelaskan variasi dalam partisipasi pemilih yang tinggi dan rendah, serta membedakan mengapa beberapa kelompok memilih dalam satu pemilihan dan kelompok lain memilih di yang lain. Kapasitas *Civic Duty* untuk menangkap variasi seperti itu berasal dari sensitivitas *Civic Duty* terhadap arti penting identitas dan kepentingan kelompok yang bersaing

yang dihasilkan. *Civic Duty* memotivasi seseorang untuk memilih karena rasa kewajiban yang dihasilkan oleh identitas kelompok ganda, dengan identitas-identitas ini saling melengkapi satu sama lain dan meningkatkan rasa kewajiban warga negara atau bertentangan satu sama lain dan mengurangi perasaan semacam itu.

Metode Penelitian

Partisipan

Penelitian ini dilakukan dengan 380 partisipan. Partisipan merupakan warga Tangerang Selatan. Partisipan mengisi kuesioner secara online dengan menggunakan google form.

TEKNIK ANALISIS

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda menggunakan *software* SPSS versi 20.00. *Civic Duty to Vote* pada penelitian ini didasarkan oleh pengukuran dikembangkan oleh Blais dan Galais (2016). Sedangkan untuk pengukuran *Political Efficacy* berdasarkan dari Craig, Niemi, & Silver (1990) melalui dua dimensi yaitu

dimensi internal dan eksternal. Terakhir, untuk pengukuran *social identity* menggunakan pengukuran Cameron (2004) dengan nama *Three Dimensional Strength of Group Identification Scale*.

HASIL PENELITIAN

Peneliti melihat skala R square untuk mengetahui persentase varian sebagai partisipasi politik sebagai variabel dependen, *political efficacy* sebagai variabel independen, dan *socal identity* sebagai variabel independen kedua.

Tabel 1. Model summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.527	.524	6.89727

a. Dependent Variable: *Civic duty to vote*

b. Predictors: (Constant), *Political efficacy*, *Socal identity*.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,527, atau 52,7%. Hal ini mengandung makna bahwa proporsi varians dari *Civic duty to vote* yang dijelaskan oleh *political efficacy* dan *socal identity* sebesar 52,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Selanjutnya, peneliti ingin melihat pengaruh dari keseluruhan *independent variable* terhadap partisipasi politik. Hal ini dapat dilihat dalam hasil uji F pada Tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat signifikansi dari keseluruhan *independent variable* (IV) terhadap partisipasi politik.

Tabel 2. ANOVA^a

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	18916.678	2	9458.339	198.820	.000 ^a
Residual	16983.322	357	47.572		
Total	35900.000	359			

a. *Dependent Variable: Civic duty to vote*

b. *Predictors: (Constant), Political efficacy, Social identity.*

Langkah selanjutnya adalah menganalisis pengaruh semua variabel independen terhadap partisipasi politik. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 198, diperoleh nilai F 198,820, yang berarti bahwa rasio nilai regresi adalah 198 kali lebih besar dari residual. Maka nilai-p adalah 0,000 (sig. <0,05). Dengan demikian hipotesis utama yang berbunyi ada efek *political efficacy* dan *social identity* terhadap *Civic duty to vote*.

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor internal yaitu *political efficacy* dan faktor eksternal yaitu

social identity terhadap *civic duty to vote*. Faktor internal mempunyai dampak yang signifikan terhadap *civic duty to vote* sedangkan faktor eksternal tidak memiliki dampak yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa *civic duty to vote* bersifat kesadaran diri akan kewajiban warga negara dalam memilih di suatu pemilihan.

Political efficacy mempunyai peranan penting dalam membangun kesadaran warga negara dalam suatu pemilihan. Beberapa literatur tentang sistem pemilihan demokratis dan jumlah pemilih telah menghubungkan antara *political efficacy* dan jumlah pemilih dalam pemilihan (Karp & Banducci, 2008). Menurut Bowler, Lanoue, dan Savoie (1994) rendahnya *political efficacy* kemungkinan akan menghasilkan tingkat *civic duty to vote* yang lebih rendah.

Faktor *social identity* dalam *civic duty to vote* menekankan bahwa hal ini harus menginternalisasi eksternalitas yang berarti berhubungan dengan kelompoknya. Schram dan Sonnemans (1996) dan baru-baru ini Großer dan

Schram (2006) dan Fowler dan Kam (2007) mengeksplorasi pengaruh kelompok sosial terhadap jumlah pemilih, semuanya menemukan bukti yang mendukung pentingnya identifikasi kelompok. Namun, hampir tidak ada bukti empiris sampai saat ini tentang pentingnya kelompok untuk partisipasi pemilih (Ben-Bassat & Dahan, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadu, T. S., Don, Y. B., & Hamzat, I. H. (2016). The Influence of Citizenship Norms, Efficacy Belief, and Parents' Participation on Students' Civic Engagement in Nigerian Universities: Data Screening and Preliminary Analysis. *Journal of Educational and Social Research*, 6(2), 81.
- Aldrich, J. H. (1993). Rational choice and turnout. *American journal of political science*, 246-278.
- Ashforth, B. E., & Mael, F. A. 1989. Social identity theory and the organization. *Academy of Management Review*, 14: 20–39.
- Blais, A. (2000). To vote or not to vote?: The merits and limits of rational choice theory. *University of Pittsburgh Press*.
- Blais, A., & Achen, C. H. (2010). Taking civic duty seriously: Political theory and voter turnout. *Unpublished manuscript*.
- Blais, A., & Galais, C. (2016). Measuring the civic duty to vote: A proposal. *Electoral Studies*, 41, 60-69.
- Beerbohm, E. (2012). *In our name: The ethics of democracy*. Princeton University Press.
- Ben-Bassat, A., & Dahan, M. (2012). Social identity and voting behavior. *Public Choice*, 151(1-2), 193-214.
- Bowler, S., Lanoue, D. J., & Savoie, P. (1994). Electoral systems, party competition, and strength of partisan attachment: evidence from three countries. *The Journal of Politics*, 56(4), 991-1007.
- Cameron, J. E. (2004). A three-factor model of social identity. *Self and identity*, 3(3), 239-262.
- Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E. (1954). *The voter decides*. Evanston, IL: Row, Peterson and Company.
- Chapman, E. B. (2015). *There is a Duty to Vote: Grounds for the 'Folk Theory of Voting Ethics'*. Working Paper.
- Carlsson, F., & Johansson-Stenman, O. (2009). Voting motives, group identity, and social norms. *rapport nr.: Working Papers in Economics* 366.
- Craig, S.C, Niemi, R. and Silver, G.E. (1990). Political Efficacy and Trust: A Report on the NES Pilot Study Items. *Political Behavior* Vol. 12, No. 3, 289-314.
- Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquail, C. V. 1994. Organizational images and member identification.

- Administrative Science Quarterly*, 39: 239–263.
- Foster, M. F. (2018). *Identity, Civic Duty and Electoral Participation: Causes of Variation in Electoral Participation* (Doctoral dissertation University of Colorado at Boulder).
- Fowler, J. H., & Kam, C. D. (2007). Beyond the self: Social identity, altruism, and political participation. *The Journal of politics*, 69(3), 813-827.
- Großer, J. & Schram, A. (2006). Neighborhood information exchange and voter participation: An experimental study. *American Political Science Review*. 100(2): 235-248.
- Goldman, A. I. (1999). Why citizens should vote: A causal responsibility approach. *Social philosophy and policy*, 16(2), 201-217.
- Gerber, A. S., Green, D. P., & Larimer, C. W. (2008). Social pressure and voter turnout: Evidence from a large-scale field experiment. *American political Science review*, 102(1), 33-48.
- Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping the moral domain. *Journal of personality and social psychology*, 101(2), 366.
- Green, D. P., & Gerber, A. S. (2019). *Get out the vote: How to increase voter turnout*. Brookings Institution Press.
- Greene, Steven. 2002. "The Social-Psychological Measurement of Partisanship." *Political Behavior* 24(3):171-197.
- Hylmö, A., & Wennerhag, M. (2012). Does class matter in protests? Social class, attitudes towards inequality, and political trust in European demonstrations in a time of economic crisis. In *2012 SISP Conference*.
- Karp, J. A., & Banducci, S. A. (2008). Political efficacy and participation in twenty-seven democracies: How electoral systems shape political behaviour. *British journal of political science*, 311-334.
- Kahne, J., & Westheimer, J. (2006). The limits of political efficacy: Educating citizens for a democratic society. *Ps-Political Science and Politics*. 39(2),289-296.
- Knack, S. (1992). Civic norms, social sanctions, and voter turnout. *Rationality and society*, 4(2), 133-156.
- Niemi, R. G., Craig, S. C., & Mattei, F. (1991). Measuring internal political efficacy in the 1988 National Election Study. *American Political Science Review*, 85(4), 1407-1413.
- Ognyanova, K., & Ball-Rokeach, S. J. (2015). Political efficacy on the internet: A media system dependency approach. In *Communication and Information Technologies Annual* (pp. 3-27). Emerald Group Publishing Limited.

- Schram, A. & Sonnemans, J. (1996). Why people vote: Experimental evidence. *Journal of Economic Psychology*. 17: 417-442
- Tuck, Richard. 2008. *Free Riding*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Tajfel, H. (1978). *Differentiation between social groups*. London: Academic Press.
- Tajfel, H., Turner, J. C., Austin, W. G., & Worchel, S. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. *Organizational identity: A reader*, 56-65.
- Turner, J. C., & Oakes, P. J. (1986). The significance of the social identity concept for social psychology with reference to individualism, interactionism and social influence. *British Journal of Social Psychology*, 25(3), 237-252.
- Valentino, N.A., Gregorowicz, K., and Groenenendyk, E.W. (2009). Efficacy, Emotions, and the Habit of Participation. *Political Behaviour* Vol. 31, pp 307-330.
- Verba, S., Schlozman, K.L., Brady, H.E., 1995. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press, Cambridge.
- Whetten, D. A., & Mackey, A. 2002. A social actor conception of organizational identity and its implications for the study of organizational reputation. *Business & Society*, 41: 393-414.